



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM
UNIT KERJA : ANGGOTA BIDANG PENGELOLAAN KAWASAN DAN INVESTASI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HARLAS BUANA
2. Jabatan : DIREKTUR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3. NHK : 792465

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.873.190.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 159 m²/80 m² di KAB / KOTA BANDUNG, WARISAN Rp. 565.500.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 87 m²/225 m² di KAB / KOTA KOTA BATAM , HASIL SENDIRI Rp. 642.600.000
3. Tanah Seluas 396 m² di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 656.250.000
4. Tanah Seluas 4584 m² di KAB / KOTA SUBANG, WARISAN Rp. 1.008.840.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 415.800.000

1. MOTOR, HARLEY DAVIDSON FLHX STREET GLIDE Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 234.000.000
2. MOBIL, SUZUKI ESCUDO XL-7 MT/JEEP Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 87.300.000
3. MOBIL, HONDA JAZZ GE8 1.5 EAT/MINI BUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 94.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 20.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 449.544.915

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 3.758.534.915

III. HUTANG Rp. ----



IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

3.758.534.915

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.